

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS PANCASILA UNTUK KEPEMIMPINAN ANTI-KORUPSI: STUDI KUALITATIF TENTANG NILAI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Yusuf Siswantara

Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia.

yusufsiswantara@gmail.com

Abstract

This research examines the values and implementation of Pancasila-based education in addressing the issue of corruption in Indonesia. Using a qualitative approach and descriptive-reflective method, this study analyzes the profile of Pancasila-based leadership as an effort to build leaders with integrity. The results of the research indicate that character education based on Pancasila values, such as integrity, ethics, and anti-corruption, should be deeply embedded in the education system to produce qualified leaders and communities that are resilient to corruption. The implementation of anti-corruption education in Indonesia is also a focus of this research, as a concrete step in addressing the issue of corruption and building leadership based on Pancasila values.

Keywords: *Pancasila-based education, Corruption, Integrity, Character education, Leadership*

Pendahuluan

Korupsi yang terjadi dalam kepemimpinan di Indonesia telah merugikan kepentingan rakyat, menghancurkan reputasi bangsa di mata internasional, menghambat pembangunan yang berkelanjutan, dan merusak integritas dan martabat pemimpin sebagai teladan bagi masyarakat. Pelanggaran terhadap etika dan nilai-nilai Pancasila, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin, serta dampak negatif terhadap pembangunan, lingkungan, dan hubungan internasional, menjadi masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya memberantas korupsi oleh pemimpin (Angelia, 2022).

Korupsi yang merajalela di Indonesia harus segera diatasi, dan model kepemimpinan yang menentukan dan strategis bagi pembangunan etika politik menjadi salah satu pintu solusi. Pemimpin yang memiliki integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik dapat memimpin perubahan positif dalam upaya memberantas korupsi. Melalui teladan perilaku yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, pemimpin dapat membangun budaya anti-korupsi yang kuat. Dengan mendorong perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan yang mengurangi celah bagi tindakan korupsi, pemimpin yang berpihak pada kepentingan publik akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Dalam menghadapi tantangan korupsi, model kepemimpinan yang baik menjadi kunci untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efisien, dan bertanggung jawab di Indonesia.

Sejumlah penelitian tentang kepemimpinan dan pemimpin Pancasila pernah dilakukan oleh para peneliti dan akademisi. Misalnya, penelitian oleh Putra & Wajdi (2021) yang mengungkapkan bahwa Pancasila bisa menjadi inspirasi pembentukan character building. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data berupa wawancara dan analisis dokumen dengan subjek penelitian sebanyak 17 peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Program Studi PPKn USN Kolaka angkatan 2018 memiliki pengetahuan yang minim mengenai nilai-nilai kepemimpinan, dengan 5 dari 17 mahasiswa memahami sedikit tentang nilai-nilai kepemimpinan, dan 12 mahasiswa lainnya belum memahaminya. Implementasi nilai-nilai kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila perlu ditingkatkan dengan pemahaman dan aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan. Selanjutnya, penelitian Hidayah (2020) melaporkan kajian pengembangan identitas. Penelitian ini mengkaji strategi pengembangan identitas kepemimpinan untuk menguatkan kesadaran kebangsaan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan berhasil menginternalisasi nilai-nilai Pancasila,

meningkatkan karakter dan identitas kepemimpinan peserta. Pendidikan dan pelatihan menjadi sarana pengembangan pola pikir dan tindakan anggota (Hidayah, 2020).

Meskipun sudah banyak penelitian tentang kepemimpinan dan pemimpin Pancasila, masih banyak kekurangan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian baru yang lebih fokus pada aspek-aspek tertentu dalam kepemimpinan di Indonesia masih perlu dilakukan. Penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih dalam tentang kemampuan kepemimpinan khususnya pemimpin Pancasila, seperti kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan untuk memimpin dalam situasi yang kompleks. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah bagaimana profil dan karakteristik pemimpin yang efektif dalam mengatasi masalah korupsi sebagai masalah moral di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi model kepemimpinan yang bersumber dari nilai-nilai moral Pancasila, khususnya pendidikan nilai dan karakter generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data dari literatur yang telah tersedia. Metode deskriptif-reflektif digunakan untuk menggali profil dan karakteristik pemimpin Pancasila yang efektif dalam mengatasi masalah kepemimpinan di Indonesia. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait kepemimpinan dan pemimpin Pancasila. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisa untuk menemukan pemahaman yang berkaitan dengan profil dan karakteristik pemimpin Pancasila yang efektif.

Setelah ditemukan kata kunci, interpretasi refleksi kritis dilakukan untuk memahami makna dari data yang telah dihimpun. Dalam interpretasi ini, peneliti melakukan refleksi kritis terhadap data yang ada dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis komparatif untuk membandingkan karakteristik pemimpin Pancasila yang efektif di masa lalu dengan kondisi saat ini. Hasil dari penelitian ini kemudian disajikan secara naratif dengan menjelaskan profil dan karakteristik pemimpin Pancasila yang efektif dalam mengatasi masalah kepemimpinan di Indonesia. Narasi ini dilengkapi dengan refleksi etik serta implikasi pedagogis. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pikir terkait pendidikan karakter kebangsaan, terkhusus kepemimpinan berbasis nilai-nilai bangsa dalam Pancasila bagi calon pemimpin dan juga membantu meningkatkan kualitas kepemimpinan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila: Etika Politik dalam Kepemimpinan

Pancasila merupakan sebuah etika, yaitu bidang politik. Dalam hal ini, Magnis-suseno (2021) menegaskan bahwa sasaran etika politik Pancasila adalah perilaku, kehidupan, dan semangat politik para pemimpin bangsa. Di tangan mereka, nilai-nilai Pancasila akan terwujud dalam sistem perundang-undangan, kebijakan dan pengambilan keputusan publik, serta kontrol atas kekuasaan yang berjalan dalam tata kelola negara (Magnis-suseno, 2021). Pancasila hadir untuk memastikan bahwa kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia dilindungi dan terjamin sehingga kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa terwujud, demi keterlibatan dalam kehidupan bangsa-bangsa, sebagaimana dirumuskan dalam UUD'45. Atas tujuan mulia tersebut, nilai-nilai Pancasila dinyatakan sebagai dasar bagi bangsa dan negara, khususnya tata kelola negara dalam suatu pemerintahan negara Indonesia. Jelas, Pancasila merupakan etika politik yang bersifat publik; perwujudan dan pelaksanaan tidak bersifat pribadi, tetapi terwujud dalam setiap keputusan pemimpin yang berkuasa, baik yudikatif, legeslatif, dan eksekutif. Di dalam 'pribadi' pemimpin yang sedang berkuasa itulah, Pancasila harus diamalkan dalam setiap kebijakan dan keputusan politik yang berdampak bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia (Magnis-suseno, 2021).

Sila pertama menekankan bahwa prinsip Ketuhanan Yang Mahaesa merupakan kompas kebijakan publik. Permasalahannya adalah prinsip ini mengalami pergeseran dan penyempitan ke satu dimensi saja: institusi agama. Sementara itu, di luar institusi agama, penghayatan 'ketuhanan' seolah-olah 'dikesampingkan dalam pelayanan oleh negara'. Penyempitan berlanjut kepada 'agama resmi'. Dengan demikian, agama non-resmi 'tidak dijamin oleh negara'. Pergeseran dan penyempitan makna ini membuat 'kewajiban dan kehadiran negara' dalam hidup masyarakat menjadi sempit pula.

Alhasil, tindakan intoleransi terjadi tanpa adanya kehadiran negara. Pembakaran tempat ibadah ataupun pengusiran kegiatan keagamaan mengindikasikan sempitnya prinsip ketuhanan dan semakin hilangnya peran negara dalam pelaksanaan sika Ketuhanan Yang Mahaesa.

Menurut Magnis-suseno (2021) dengan mendasarkan diri pada gagasan Drijarkara, *kemanusiaan yang adil dan beradab* merupakan nilai paling mendasar. Dijelaskan bahwa keadaban mengangkat suatu hal ke tingkat nilai; sebaliknya, tanpa keadaban, suatu nilai akan hilang. Misalnya, sebuah agama yang dihayati dengan tidak beradab adalah kebencian dan ancaman bagi pemeluk lain; persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak beradab akan bertindak tidak adil terhadap bangsa lain; kerakyatan dan gotong royong yang dilakukan dengan tidak adil akan menghasilkan kekuasaan oligarki. Dalam etika publik, *kemanusiaan yang adil dan beradab* berarti 'menolak' kekerasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Membiarkan pelanggaran terhadap keduanya, berarti kemandulan negara itu sendiri Negara, dengan seluruh peralatannya, wajib memastikan bahwa HAM dilindungi tidak dan ada kekerasan, baik manusia ataupun alam lingkungan (Magnis-suseno, 2021).

Sementara itu, *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan* kiranya mengalami nasib sebagaimana sila pertama. Prinsip kerakyatan dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan bergeser kepada pemungutan suara dan suara terbanyak. Sistem mayoritas-minoritas terbentuk dalam sistem politik Indonesia. Hal ini kontras dengan peristiwa perubahan 7 kata dalam sila pertama, dimana mayoritas 'tidak menggunakan keistimewaan sebagai mayoritas' untuk memutuskan; sebaliknya, hikmat kebijaksanaanlah yang menjadi dasar pijakan sehingga terwujudlah rumusan: Ketuhanan Yang Mahaesa. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pemimpin menempati posisi strategis bagi terwujudnya *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan* (Aminullah, 2015; Magnis-suseno, 2021).

Jika sebuah kepemimpinan menentukan 'wajah' demokrasi, aktor yang sama juga menentukan hadir-tidaknya *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* serta *Persatuan Indonesia*. Pembangunan, sistem ekonomi, dan segala kebijakan publik menentukan terwujudnya keadilan sosial, dimana akan berdampak pula pada rasa persatuan. Artinya, tidak-hadirnya keadilan sosial akan berdampak pada rasa kesatuan dan persaudaraan. Jika suatu wilayah merasa diri sebagai anak tiri dari bangsa ini, maka rasa keadilan sosial negara telah digugat oleh rakyatnya (Wisnumurti et al., 2019).

Dengan demikian, Pancasila sebagai etika politik yang diterapkan dalam perilaku pemimpin bangsa harus diamalkan dalam setiap kebijakan politik. Namun, terdapat pergeseran dan penyempitan makna dalam prinsip Ketuhanan Yang Mahaesa dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Penting bagi negara dan pemimpin untuk memastikan penerapan nilai-nilai Pancasila secara adil, beradab, dan melibatkan seluruh masyarakat dalam pengambilan keputusan politik untuk menjaga prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar tata kelola negara di Indonesia.

Korupsi dalam Dinamika Kepemimpinan Indonesia

Praktik korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang telah mengakar dalam berbagai sektor (Fajri, 2022). Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat korupsi adalah kepemimpinan politik. Dalam arti seluas-luasnya, kepemimpinan politik dapat berlaku kurang bermoral dan tidak menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan etika politik, yaitu standar nilai moral dalam menjalankan amanah rakyat melalui kepemimpinannya. Pemimpin politik yang tidak menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas cenderung mempengaruhi lingkungan dan sistem sosial, menciptakan celah untuk praktik korupsi. Terkadang, kebijakan ekonomi dan politik yang berpihak pada kelompok tertentu serta pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan minoritas yang masih terjadi juga dapat menjadi faktor lain yang berhubungan dengan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah korupsi, dibutuhkan suatu pendekatan kepemimpinan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua lapisan pemerintahan dan masyarakat. Kepemimpinan menjadi isu yang krusial dalam kajian korupsi sebagai penyakit moral bangsa. Mengapa demikian? Sebab, para pemimpin suatu negara akan menentukan nasib warganya. Itulah sebabnya judicial review atau gugatan UU dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia (Husodo, 2020).

Dalam sejarah Indonesia, banyaknya pergantian kepemimpinan yang tidak konsisten, bahkan

bertentangan dengan kepentingan rakyat, menjadi penyebab stagnasi pembangunan. Data menunjukkan bahwa dari 1945 hingga 2021, Indonesia telah mengalami 9 periode kepemimpinan yang berbeda, dengan beragam masalah dan tantangan yang dihadapi. Pancasila tetap memegang posisi penting sebagai dasar ideologi negara di Indonesia sepanjang periode presiden-presiden yang telah memimpin, meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam dinamika sosial-politik di negara ini. Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, telah menjadi panduan bagi pemerintahan selama berbagai periode presiden di Indonesia. Sejak masa pemerintahan Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia, Pancasila diakui sebagai pandangan dunia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Soekarno bahkan menyebut Pancasila sebagai "ideologi nasional" dan mendasarkan kebijakannya pada prinsip-prinsip Pancasila.

Pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila tetap menjadi dasar ideologi negara, tetapi pemerintahannya dikenal dengan penerapan ideologi Pancasila yang lebih otoriter. Soeharto mengedepankan konsep "Pancasila sebagai pandangan hidup" yang menempatkan Pancasila sebagai landasan bagi pengaturan kehidupan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, Pancasila tetap diakui sebagai dasar ideologi negara, tetapi implementasinya dihadapkan pada tantangan dan perubahan sosial-politik di Indonesia. Demikian pula, pada masa pemerintahan Joko Widodo, Pancasila tetap menjadi panduan bagi pemerintahan dengan penekanan pada pendidikan Pancasila, promosi kebhinekaan, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasi Pancasila dalam praktik pemerintahan masih dihadapkan pada tantangan dan kritik, mengingat dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang di Indonesia.

Beberapa presiden mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila, seperti pendidikan Pancasila, promosi kebhinekaan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Selama periode kepemimpinan presiden-presiden di Indonesia, penghayatan Pancasila mengalami gap atau celah yang berbeda-beda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya praktik korupsi. Pada masa pemerintahan Soeharto, misalnya, meskipun Pancasila tetap diakui sebagai dasar ideologi negara, namun penerapan ideologi Pancasila lebih condong pada pendekatan otoriter. Konsep "Pancasila sebagai pandangan hidup" ditekankan, yang menempatkan Pancasila sebagai landasan bagi pengaturan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia; namun, dalam prakteknya, terdapat pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta adanya tindakan represif terhadap oposisi politik, yang mengurangi penghayatan yang inklusif terhadap nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, atau Joko Widodo, Pancasila tetap diletakkan sebagai dasar ideologi negara dengan mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Namun, terdapat celah dalam penghayatan Pancasila, terutama terkait dengan konflik yang masih terjadi antara kelompok agama dan etnis, serta isu kebebasan beragama dan hak minoritas yang masih menjadi tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh. Selain itu, masih terjadi pelanggaran dalam hak asasi manusia, perlindungan terhadap minoritas, serta, terutama, korupsi dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kelompok tertentu.

Secara logis, meskipun nilai-nilai Pancasila telah dipromosikan oleh para pemimpin Indonesia, praktik korupsi tetap menjadi masalah yang memprihatinkan. Terdapat kekhawatiran bahwa model kepemimpinan yang kurang menghayati nilai-nilai Pancasila dapat menjadi faktor utama dalam meningkatnya praktik korupsi di Indonesia, terutama ketika kebijakan ekonomi dan politik masih berpihak pada kelompok tertentu dan pelanggaran hak asasi manusia serta perlindungan minoritas masih sering terjadi.

Sebagaimana kita ketahui, korupsi merupakan suatu masalah yang kompleks dan merugikan bagi suatu negara dan masyarakat. Kerumitan masalah ini berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, dan faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Beberapa di antaranya adalah sistem hukum dan regulasi yang lemah menjadi faktor penyebab korupsi. *Faktor pertama* adalah bahwa ketika regulasi tidak jelas, atau pengawasan yang minim, para pemimpin atau pejabat publik dapat dengan mudah memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindakan koruptif. Selain itu, ketika

tindakan koruptif jarang ditindaklanjuti atau tidak dikenai sanksi yang tegas, hal ini dapat menciptakan budaya impunitas yang mendorong terjadinya korupsi.

Faktor kedua, kondisi ekonomi yang rentan juga menjadi faktor penyebab korupsi. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran dapat menciptakan tekanan ekonomi pada para pemimpin atau pejabat publik. Dalam situasi ekonomi yang sulit, para pemimpin atau pejabat publik yang merasa terdesak untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat cenderung menerima suap atau gratifikasi sebagai cara untuk mengatasi kesulitan keuangan mereka. Selain itu, kesenjangan ekonomi yang signifikan antara para pejabat publik dan masyarakat umum juga dapat memicu rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang dapat menciptakan iklim yang memudahkan terjadinya korupsi.

Selain kedua faktor, kita sepakat juga bahwa budaya korupsi yang melekat dalam masyarakat juga menjadi faktor penyebab korupsi. Ketika korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah atau diterima dalam suatu budaya atau lingkungan, sulit untuk memberantasnya. Norma-norma sosial yang merendahkan integritas dan menghargai kekayaan atau kekuasaan bisa mendorong praktik korupsi di kalangan pemimpin atau pejabat publik. Misalnya, dalam budaya yang mengedepankan nepotisme atau koneksi personal dalam pengambilan keputusan, maka praktik korupsi seperti penyalahgunaan wewenang atau pengaturan proyek dapat dianggap sebagai hal yang biasa.

Faktor keempat adalah kurangnya pendidikan dan kesadaran anti-korupsi di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penyebab korupsi. Tanpa pemahaman yang cukup tentang pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan, masyarakat mungkin tidak aktif dalam mengawasi dan melibatkan diri dalam pencegahan korupsi. Kurangnya pendidikan anti-korupsi yang berbasis pada nilai-nilai integritas dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap praktik korupsi. Sebaliknya, peningkatan kesadaran anti-korupsi akan berkorelasi positif terhadap tindakan dan perilaku anti korupsi (Badan Pusat Statistik, 2021).

Sementara itu, faktor kelima adalah politik, dimana politik uang, penyalahgunaan kekuasaan politik, dan interaksi antara politik dan bisnis di Indonesia juga dapat menjadi faktor yang berkaitan dengan korupsi. Tingginya biaya politik ini berbelitan dengan berbagai faktor (mentalitas, sistem ekonomi, budaya) dalam tindak korupsi.

Beberapa faktor di atas berkaitan satu sama lain dalam korupsi yang terjadi di berbagai sektor. Untuk mengatasi isu korupsi dalam kepemimpinan, tindakan tegas dan sistemik diperlukan dalam pencegahan dan penanganannya. Artinya, dibutuhkan seorang pemimpin dengan model kepemimpinan yang mampu menciptakan sistem sosial anti korupsi, entah sistem dan prosedur, perundang-undangan, dan kode etik layanan publik, dan sebagainya. Artinya, untuk itu, tindakan tersebut membutuhkan upaya komprehensif dalam memperkuat sistem hukum, pemberantasan korupsi, dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pemimpin. Selain itu, sistem harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan (Husodo, 2020). Hanya dengan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif, perilaku anti korupsi dikuatkan dan dikembangkan, dan pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dengan demikian, kita membutuhkan karakter pemimpin yang tegas, bertindak sistematis dan komprehensif, serta nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam berbagai lini masyarakat, seperti Pancasila sebagai nilai-nilai pemimpin (Subianto, 2004).

Model Kepemimpinan Pancasila: Inspirasi Nilai-nilai Pancasila

Kepemimpinan Pancasila sangat penting di Indonesia karena Pancasila merupakan nilai dan prinsip dasar bagi bangsa dan negara. Inilah nilai-nilai mulia yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi para pemimpin saat ini. Nilai inti Pancasila tumbuh dari perjuangan Indonesia melawan kolonialisme, yang telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Selain itu, mereka muncul dari aspirasi yang terkandung dalam agama dan tradisi mengenai masyarakat yang adil dan sejahtera. Masyarakat yang adil dan sejahtera didasarkan pada kesatuan, persatuan, dan solidaritas seluruh warga negara.

Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, para founding fathers, seperti Bung Hatta, Bung Karno, Sutan Syahrir, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Natsir, dan KH Wahid Hasyim, didorong oleh *komitmen mereka pada kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu*. Mereka adalah pemimpin hebat yang bijaksana, dan mereka mengakui kekuatan rakyat Indonesia. Meskipun memiliki pendapat yang berbeda, mereka memiliki visi bersama untuk memimpin Indonesia menuju kemerdekaan dan

meletakkan dasar bagi generasi mendatang. Saat Indonesia mendekati ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100, kepemimpinan Pancasila tetap sangat penting. Indonesia telah mengalami banyak tantangan, tetapi telah muncul sebagai negara yang tangguh. Negara ini telah mencapai banyak prestasi, baik secara politik maupun ekonomi. Negara ini juga memimpin negara-negara terkaya di dunia, G20. Kepemimpinan Indonesia dalam G20 mewakili kepemimpinan Pancasila, menekankan pentingnya kolaborasi dan saling membantu.

Mengingat tantangan global saat ini, seperti perubahan iklim dan kohesi sosial, menyelesaikan masalah ini memerlukan pemimpin yang dapat memobilisasi orang untuk bekerja sama. Konsekuensinya, kepemimpinan Pancasila menjadi semakin relevan, mengingat aspirasi Indonesia untuk menjadi salah satu ekonomi dan negara terbesar di dunia. Para pemimpin Indonesia saat ini mewarisi semangat founding fathers dan mewakili kepemimpinan Pancasila. Mereka berjuang untuk kemajuan di semua sektor, termasuk ekonomi, politik, dan teknologi.

Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya, baik itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dalam konteks Pancasila, terdapat beberapa model kepemimpinan yang dapat dilakukan, yaitu kepemimpinan religius, humanis, unitaris atau nasionalis, demokratik, dan social justice (Ardiansyah, 2020; Patnistik, 2022).

Pertama-tama, Model Kepemimpinan Religius mengacu pada kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan kepercayaan. Pemimpin religius harus memegang teguh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan salah satu dasar Pancasila. Pemimpin religius harus juga menghormati keberagaman agama dan keyakinan masyarakat, serta mampu menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang baik dan benar.

Kedua, Model Kepemimpinan Humanis mengacu pada kepemimpinan yang mampu memperhatikan dan menghargai martabat kemanusiaan. Pemimpin humanis harus memegang teguh prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang merupakan salah satu dasar Pancasila. Pemimpin humanis harus juga mampu memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta memberikan solusi yang adil bagi masalah yang dihadapi.

Ketiga, Model Kepemimpinan Unitaris atau Nasionalis mengacu pada kepemimpinan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemimpin unitaris atau nasionalis harus memegang teguh prinsip Persatuan Indonesia yang merupakan salah satu dasar Pancasila. Pemimpin unitaris atau nasionalis harus juga mampu memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta mempertahankan integritas dan kedaulatan negara.

Keempat, Model Kepemimpinan Demokratik mengacu pada kepemimpinan yang dilakukan melalui mekanisme demokratis. Pemimpin demokratik harus memegang teguh prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan yang merupakan salah satu dasar Pancasila. Pemimpin demokratik harus juga mampu membuka ruang partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kelima, Model Kepemimpinan Social Justice mengacu pada kepemimpinan yang berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin social justice harus memegang teguh prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang merupakan salah satu dasar Pancasila. Pemimpin social justice harus juga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan rakyat yang lebih besar (Ardiansyah, 2020).

Model-model di atas tentunya bukanlah pemisahan wajah-wajah kepemimpinan. Sebaliknya, karena bersumber dari nilai-nilai Pancasila, maka kelima model tersebut merupakan bagian utuh sosok pemimpin Pancasila (Nugroho, 2022). Dapat dikatakan bahwa pemimpin Pancasila adalah gambaran ideal dari seorang pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai etik Pancasila dalam kepemimpinannya, yaitu keilahian, kemanusiaan, unitas, gotong-royong, demokrasi, dan keadilan sosial.

1. *Nilai rohani keilahian*: Pemimpin Pancasila menyatukan dengan sang Pencipta. Dalam dimensi rohani, seorang pemimpin mengamalkan nilai kepemimpinan yang bijaksana akan memimpin dengan integritas, visi yang jelas, dan kemampuan dalam menghadapi situasi kompleks. Pemimpin ini akan mengambil keputusan yang berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan dan mengatasi masalah yang dihadapi.

2. *Nilai kemanusiaan*: Pemimpin Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan akan memiliki sikap empati, peduli, dan menghargai martabat manusia dalam kepemimpinannya. Pemimpin ini akan memprioritaskan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta mendorong pemberdayaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakannya.
3. *Nilai kerukunan dan persatuan*: Pemimpin Pancasila yang menerapkan nilai persatuan dan kesatuan, akan menjaga persatuan bangsa Indonesia, menghindari tindakan yang dapat memecah belah masyarakat, serta mendorong kerjasama dan solidaritas antara berbagai kelompok dan daerah. Pemimpin ini akan menjadi pemersatu, mempromosikan toleransi, dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia.
4. *Nilai Gotong royong*: Pemimpin Pancasila yang menerapkan nilai gotong royong akan menggalang kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin ini akan menjadi contoh dalam memberdayakan masyarakat, memfasilitasi kerjasama antara berbagai sektor, serta memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan berorientasi pada kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian, musyawarah merupakan metode pengambilan keputusannya. Pemimpin Pancasila menjunjung tinggi nilai musyawarah dan karenanya akan menggali dan menghargai berbagai pandangan dan pendapat dalam pengambilan keputusan. Pemimpin ini akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta berkomunikasi dan berdialog dengan berbagai pihak untuk mencapai konsensus yang menguntungkan bersama.
5. *Nilai keadilan sosial*: Pemimpin Pancasila yang mengamalkan nilai keadilan sosial akan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk golongan yang kurang mampu, dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Pemimpin ini akan berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta memastikan distribusi sumber daya yang adil bagi seluruh masyarakat.

Pancasila bukan hanya menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, namun juga harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan memperjuangkannya dalam berbagai bidang kehidupan. Konsekuensi lainnya adalah bahwa ketika memilih pemimpin yang dapat dikatakan telah berjiwa Pancasila, sebaiknya kita memilih orang yang sudah membuktikan bahwa dirinya memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Ada banyak nama-nama yang dapat kita nominasikan sebagai pemimpin yang berbasis Pancasila, namun yang terpenting adalah bahwa setiap pemimpin harus dapat memperjuangkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan konsekuen dalam setiap tindakan dan keputusannya (Dr Nuah P Tarigan, 2022).

Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila: Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Abad 21

Pada masa Bung Hatta dan Bung Karno bekerja sama dengan pihak Jepang, mereka memiliki satu tujuan yang jelas, yaitu untuk kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini juga berlaku bagi tokoh bangsa lainnya yang bertindak tanpa mempertimbangkan golongan mereka. Dengan sistem pemikiran ini, para tokoh bangsa menjadi individu yang sangat gigih dalam berjuang, karena mereka menyadari bahwa apa yang diperjuangkan jauh lebih besar daripada kepentingan individu, yakni untuk kepentingan Indonesia dan merespons tantangan zamannya. Semangat ini menginspirasi generasi sekarang untuk menghadapi tantangan zaman masa kini dengan pendekatan yang sama, yaitu mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan individu. Sikap ini memperlihatkan bahwa semangat berjuang demi kepentingan rakyat dan bangsa masih relevan dan perlu diterapkan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.

Saat ini, generasi muda di abad 21 menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Mereka dihadapkan pada perubahan teknologi yang cepat, globalisasi yang semakin terhubung secara global, ketidakpastian ekonomi, perubahan sosial dan budaya yang cepat, isu lingkungan yang serius, serta kesehatan dan kesejahteraan yang kompleks. Generasi muda harus menghadapi dampak teknologi yang terus berkembang, seperti penggunaan media sosial yang intens dan digitalisasi pekerjaan yang mempengaruhi cara mereka hidup sehari-hari. Mereka juga dihadapkan pada persaingan ketat dalam pasar kerja global, serta pengaruh budaya dan nilai-nilai

yang beragam dari berbagai negara. Selain itu, tantangan ekonomi seperti kesulitan dalam mencari pekerjaan yang stabil, menghadapi krisis ekonomi, dan biaya hidup yang tinggi juga menjadi beban bagi generasi muda. Lalu, mereka juga harus menghadapi perubahan sosial dan budaya yang cepat, termasuk dalam hal identitas, gender, agama, dan etnisitas, yang mempengaruhi nilai-nilai dan norma dalam kehidupan mereka. Isu lingkungan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi tantangan serius bagi generasi muda saat ini. Akhirnya, mereka juga dihadapkan pada tantangan kesehatan fisik dan mental, seperti gaya hidup yang tidak sehat dan stres yang tinggi dalam kehidupan modern.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, generasi muda perlu mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan sikap yang tepat. Mereka harus menjadi adaptif dalam menghadapi perubahan, mampu memecahkan masalah, kreatif dalam mencari solusi, kolaboratif dalam bekerja sama, dan memiliki kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai positif. Selain itu, mereka juga perlu memiliki pemahaman yang lebih luas dan pengalaman yang bermanfaat untuk menghadapi tantangan zaman yang kompleks ini.

Kepemimpinan Pancasila, sebagai konsep kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila, memiliki kaitan yang erat dengan menghadapi tantangan zaman yang kompleks bagi generasi muda.

Pertama, pemahaman tentang nilai-nilai dasar Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi dasar bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, generasi muda dapat memiliki landasan moral dan etika yang kuat dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam menghadapi tantangan yang kompleks, dengan memastikan bahwa kepentingan rakyat dan keberlanjutan bangsa menjadi prioritas utama.

Kedua, keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman seperti adaptabilitas, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai positif, juga sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai Pancasila mengutamakan keadilan, persatuan, keberagaman, musyawarah, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Oleh karena itu, generasi muda perlu mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila untuk dapat memimpin dengan bijaksana dan berdasarkan nilai-nilai positif dalam menghadapi tantangan zaman yang kompleks.

Ketiga, pemahaman yang lebih luas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pengalaman yang bermanfaat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan memahami nilai-nilai dasar Pancasila secara menyeluruh, generasi muda dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman yang kompleks. Pengalaman yang bermanfaat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga dapat memperkuat pemahaman dan komitmen generasi muda terhadap kepemimpinan Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman.

Dengan demikian, kepemimpinan Pancasila penting sekali karena terkait erat dengan tantangan zaman yang kompleks bagi generasi muda. Dengan mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan sikap yang tepat, serta menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kepemimpinan mereka, generasi muda dapat menjadi pemimpin yang bijaksana, beretika, dan berbasis nilai-nilai positif dalam menghadapi tantangan zaman yang kompleks di abad 21. Dengan mengembangkan kepemimpinan Pancasila dalam dirinya, generasi muda siap mengambil peran penting dalam mencapai perubahan positif bagi masyarakat dan dunia yang lebih baik. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan di masa depan, generasi muda dapat berperan aktif dalam menghadapi tantangan zaman ini, mengambil langkah progresif, dan mencapai masa depan yang lebih baik untuk mereka dan generasi mendatang (Patnistik, 2022).

Pancasila bisa menjadi inspirasi pembentukan *character building*. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki potensi besar sebagai inspirasi dalam pembentukan *character building* atau pembangunan karakter generasi muda. Prinsip-prinsip Pancasila yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial dapat menjadi panduan yang kuat dalam membentuk karakter yang baik bagi

generasi muda Indonesia. Nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dapat menjadi dasar untuk membangun karakter yang berlandaskan pada sikap religius, menghargai dan menghormati keberagaman keyakinan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat menginspirasi pembentukan karakter yang menghargai martabat dan hak asasi manusia, serta memiliki sikap toleransi, empati, dan mengedepankan perdamaian. Nilai persatuan dan kesatuan dapat menjadi dasar untuk membangun karakter yang memiliki semangat persatuan, menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan menghindari sikap divisive. Pancasila juga mengajarkan nilai keadilan sosial yang dapat menginspirasi generasi muda untuk memiliki kesadaran sosial, kepedulian terhadap masyarakat, dan tindakan nyata dalam membangun keadilan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam character building, generasi muda Indonesia dapat menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas, beretika, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara (Putra & Wajdi, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Korupsi, sebagai masalah moral dan nilai etik, menjadi tantangan serius bagi bangsa Indonesia. Untuk menghadapinya, diperlukan pendekatan karakter seorang pemimpin yang berani menghidupi nilai-nilai Pancasila, sebagai norma etika politik yang disepakati oleh bangsa Indonesia. Kepemimpinan berbasis nilai Pancasila menjadi model kepemimpinan yang diperlukan dalam penguatan karakter anti korupsi dalam penanganan tindak kejahatan korupsi. Dalam menghadapi tantangan zaman abad 21, pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila sangat penting dilakukan, terutama untuk generasi muda. Generasi Z, sebagai generasi yang tumbuh di era modern yang kompleks, perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam berperilaku dan menghadapi korupsi sebagai masalah moral dan etik yang merusak bangsa.

Untuk itu, rekomendasi penelitian selanjutnya adalah untuk mengkaji indeks persepsi dan indeks pengalaman Generasi Z terhadap perilaku anti korupsi yang berbasis nilai Pancasila. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data dari Generasi Z mengenai pandangan mereka tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan korupsi, serta pengalaman mereka dalam menghadapi tindakan korupsi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai persepsi dan pengalaman Generasi Z terhadap pendekatan karakter berbasis nilai Pancasila dalam penguatan karakter anti korupsi. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan program pendidikan karakter yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan korupsi di era modern. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kesadaran dan partisipasi Generasi Z dalam gerakan anti korupsi, sehingga dapat membentuk pemimpin masa depan yang memiliki integritas dan nilai-nilai Pancasila yang kokoh.

Daftar Pustaka

- Aminullah. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 3(1), 620–628.
- Angelia, D. (2022). *Menilik Statistik Korupsi di Indonesia*. Goodstats.Id.
<https://goodstats.id/article/menilik-statistik-korupsi-di-indonesia-IWZN8>
- Ardiansyah, R. (2020). *Kepemimpinan Karakter Pancasila*. Idsejarah.Net.
<https://idsejarah.net/2020/05/kepemimpinan-karakter-pancasila.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021. *Bps.Go.Id*, 1, 1–142.
<https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/indeks-perilaku-anti-korupsi-2021.html>
- Dr Nuah P Tarigan. (2022). Sila Pancasila dan Kepemimpinan. *Binus.Ac.Id*, May.
- Fajri, D. L. (2022). *8 Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Total Kerugian Negara*. Katadata.Co.Id.
<https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201fc94110d8/8-kasus-korupsi-di-indonesia-berdasarkan-total-kerugian-negara#:~:text=Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia 1 1. PT,7 7. E-KTP ... 8 8. Hambalang>
- Hidayah, H. T. (2020). *Internalization of Pancasila Values in Developing Leadership Identity*. 418(Acece 2019), 140–142.
- Husodo, A. T. (2020). *Laporan Tahunan 2020 : Indonesia Corruption Watch*. 1–33.

- Magnis-suseno, F. (2021). Pancasila Apa Masih Dapat Dipegang? Sebuah Esai. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 1(2), 93–101.
- Nugroho, H. (2022). Etika dan Integritas Menjadi Karakteristik Pemimpin di Era New Normal. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2, 1–2.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15799/Pandemi-Covid-19-dan-Upaya-Pencegahan.html>
- Patnistik, E. (2022). *Menyambut Tantangan Masa Depan dengan Kepemimpinan Pancasila*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/08/070000565/menyambut-tantangan-masa-depan-dengan-kepemimpinan-pancasila>
- Putra, Z., & Wajdi, F. (2021). Implementation Of Leadership Values in Pancasila Paradigm as Character Building Values. *SHEs: Conference Series 4*, 4(4), 45–52.
- Subianto, P. (2004). *Faktor Kepemimpinan Dalam Pemberantasan Korupsi*. Antikorupsi.Org. <https://antikorupsi.org/id/article/faktor-kepemimpinan-dalam-pemberantasan-korupsi>
- Wisnumurti, A. A. G. O., Mahardhika, I. P. E., & Yuliartika Dewi, I. G. A. A. (2019). Conception of Social Justice in Eastern Indonesia within the Framework of the Republic of Indonesia. *Iapa Proceedings Conference*, 815. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.263>